PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL PADA PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA DI SUMATERA

Skripsi

Oleh :

WIWIED WINDARI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017

ABSTRAK

PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL PADA PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA

Oleh

Wiwied Windari

Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui dan menganalisa apakah Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Sumatera.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, dengan pengujian regresi berganda dengan melakukan uji asumsi klasik sebelum mendapatkan model penelitian yang terbaik. Variabel penelitian ini adalah Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum sebagai variabel independen dan Belanja Modal sebagai variabel dependen. Jumlah populasi penelitian ini sebanyak 160 Kabupaten dan Kota dan dengan *purposive sampling* diperoleh 67 Kabupaten dan Kota sebagai sampel dari tahun 2012-2015.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap besarnya Belanja Modal. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota di Sumatera.

Kata Kunci : Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal.

ABSTRACT

EFFECT OF ECONOMIC GROWTH, REGIONAL AND REVENUE ALLOCATION FUND GENERAL BUDGET ALLOCATION OF THE CAPITAL DISTRICT GOVERMENT / CITY IN SUMATERA

By

Wiwied Windari

The purpose of this research is to find out and to analyze whether Economic Growth, Local Own Revenue, and General Alocation Fund influence the Capital Expenditure in Sumatera.

The analyze method that is used in this research is quantitive method with multiple linier regression with bring about classical assumption test before finding out the best linier model. The variabel used in this research are Economic Growth, Local Own Revenue, and General Alocation Fund as independent variable and the Capital Expenditure as dependent variable. The population is 160 regencies and cities in Sumatera, and by using purposive sampling technique, 67 regencies and cities in Sumatera the year 2012-2015 are chosen as samples.

The result proof that Economic Growth no significant influence to the Capital Expenditure. Local Own Revenue, and General Alocation Fund variable influence Capital Expenditure of Regencies and Cities in Sumatera.

***Keywords** : Economic Growth, Local Own Revenue, General Alocation Fund and Capital Expenditure.*

PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL PADA PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA DI SUMATERA

Oleh :

WIWIED WINDARI

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA EKONOMI

Pada

Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017

Judul Skripsi : **PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL PADA PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA DI SUMATERA**

Nama Mahasiswa : *Wiwied Windari*

Nomor Pokok Mahasiswa : 1211031140

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si.	**Yunia Amelia, S.E., M.Sc., Ak., CA.**
NIP 19750620 200012 2 001	NIP 19820615 201504 2 001

MENGETAHUI

2. Ketua Jurusan Akuntansi

Dr. Farichah, SE., M.Si., Akt.
NIP 19620612 199010 2 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si.** .....

Sekretaris : **Yunia Amelia, S.E., M.Sc., Ak., CA.** .....

Penguji Utama : **Kiagus Andi, S.E., M.Si., Akt.** .....

2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Prof. Dr. Hi. Satria Bangsawan, S.E., M.Si.
NIP 19610904 198703 1 011

Tanggal lulus ujian skripsi: **22 Desember 2017**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WIWIED WINDARI

NPM : 1211031140

Jurusan : Akuntansi

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya.

Bandarlampung, 22 Desember 2017

Yang menyatakan

METERAI TEMPEL

37736AEF762968904

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Wiwied Windari

NPM 1211031140

RIWAYAT HIDUP

Penulis lahir di Indramayu pada 04 Agustus tahun 1994, merupakan putri pertama dari dua bersaudara pasangan Bapak Wawan Casmadi dan Ibu Aan Yulianti. Penulis memulai pendidikan formal dari Taman Kanak-kanak di TK Cempaka Pertiwi pada tahun 1999 Losarang Indramayu. Kemudian melanjutkan ke SDN Krimun 2 Losarang Indramayu pada tahun 2000. Kemudian melanjutkan ke SMPN 2 Cikampek 2006, pada tahun 2008 pindah ke SMPN 1 Sragi Lampung Selatan, dan selesai pada tahun 2009. Selanjutnya pada tahun yang sama penulis melanjutkan sekolah menengah atas di SMAN 1 Pasir Sakti Lampung dan selesai pada maret 2012.

Pada pertengahan tahun 2012, penulis melanjutkan pendidikan pada program studi Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung melalui jalur Ujian PMPD dan lulus pada Maret 2015. Ditahun yang sama penulis melanjutkan ke Jenjang S1 melalui jalur konversi dan lulus pada Desember 2017.

Selama jadi mahasiswa penulis aktif dalam berbagai organisasi diantaranya adalah Anggota Aktif Himpunan mahasiswa jurusan akuntansi (HIMAKTA), Anggota Muda (KMB VIII) BEM Universitas Lampung periode 2012/2013, dan menjadi staff ahli keuangan BEM Universitas Lampung periode 2013/2014.

PERSEMBAHAN

Segala puji hanya milik Allah SWT, dan segala syukur atas Rahmat dan Nikmat yang tak terhitung. Dengan penuh kerendahan hati penulis ingin mempersembahkan karya kecilku ini untuk orang-orang terkasih :

- *Untuk Ayah dan Mamah ku tercinta yang senantiasa mengajarkan ku bagaimana menikmati indahnya hidup, darinya aku belajar bagaimana menjadi insan yang senantiasa bersyukur, dan darinya aku belajar memahami arti keikhlasan dan kesabaran.*

- *Untuk Alm kakekku Bapak Soebandi, nenekku Emak Cartinah dan seluruh keluarga besarku yang telah membuatku memahami indahnya sebuah ikatan keluarga yang sederhana.*

- *Untuk semua teman-teman dan sahabat-sahabat ku yang selalu mampu membuatku tersenyum, tertawa, bahkan menangis bersama kalian.*

- *Almamaterku tercinta*

MOTO

Jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang sabar (Q.S Al-Baqarah : 153).

Siapa yang bersungguh-sungguh mengerjakan sesuatu maka akan mendapatkan apa yang diinginkannya (Man Jadda Wajada).-nn

Tidak ada harga atas waktu, tetapi waktu sangat berharga, memiliki waktu tidak menjadikan kita kaya, tetapi menggunakan dengan baik adalah sumber dari kekayaan (Mario Teguh).

Selalu ada harapan bagi mereka yang sering berdo'a, Selalu ada jalan bagi mereka yang berusaha. Hasil tidak akan mengkhianati proses (Wiwied Windari)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul, “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota di Sumatera”.

Dalam menyusun skripsi ini penulis menyadari masih banyak sekali kekurangan baik dari segi penulisan maupun di dalam penguraiannya, namun demikian penulis telah mencurahkan kemampuan serta pengetahuannya secara maksimal sehingga terwujudnya Skripsi ini. Pada kesempatan ini, Penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah menyumbangkan teladan, nasehat, ilmu, motivasi, dan saran kepada penulis antara lain:

1. Bapak Prof. Dr. Satria Bangsawan, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Farichah, S.E., M.Si., Akt selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

3. Ibu Yuztitya Asmaranti, S.E., M.Si. selaku Sekertaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Ibu Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si. selaku Pembimbing Utama, atas kesediaannya dalam memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuan yang sangat membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Yunia Amelia, S.E., M.Sc., Ak., CA. selaku Pembimbing Kedua, atas kesediaannya dalam memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan dan saran serta kesabaran dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Kiagus Andi, S.E., M.Si., Akt. selaku Pembahas, atas kesediaannya dalam memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuan yang sangat membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Ibu Chara Pratami T Tubarad S.E., M.Acc., Akt selaku Dosen Pembimbing Akademik.
8. Ayah dan Mamah tercinta, dan Adik Deden untuk semua kasih sayang dan do’a yang telah diberikan selama ini.
9. Eko Budiono, S.Si, yang telah memberikan semangat, menerima segala keluhan dalam proses penyusunan skripsi dan mengajariku melakukan hal yang sederhana namun bermakna.
10. Kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, atas segala ilmu yang bermanfaat dan bermakna yang telah diberikan.
11. Bapak dan Ibu Staf Administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

12. Gamalama Solidarity, Terimakasih untuk hari-hari yang telah ada bersama kalian melewati suka dan duka.
13. Kawan-kawan seperjuangan Akuntansi Konversi 2012, bahagia dan beruntung rasanya menjadi bagian dari kalian.
14. www.makananlampung.com selaku sponsor utama dalam penyelesaian skripsi ini dan yang menyelamatkanku di pendadaran.
15. Semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan serta pengarahan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan semua tugas yang telah ditanggungkan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh untuk dapat dikatakan sempurna, untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Bandar Lampung, 22 Desember 2017

Penulis,

Wiwied Windari

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK..... i
ABSTRACT..... ii
HALAMAN PERSETUJUAN..... iii
HALAMAN PENGESAHAN..... iv
PERNYATAAN..... v
RIWAYAT HIDUP vi
PERSEMBAHAN..... vii
MOTO..... viii
KATA PENGANTAR ix
DAFTAR ISI x
DAFTAR TABEL xi
DAFTAR GAMBAR xii
DAFTAR LAMPIRAN..... xiii

BAB I. PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1
1.2. Rumusan Masalah 10
1.3. Tujuan Penelitian 10
1.4. Manfaat Penelitian 11

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 12

2.1. Tinjauan Pustaka 12
2.1.1. Teori Keagenan 12
2.2. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi 14
2.2.1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dengan Pengalokasian Belanja Modal 16
2.3. Pngertian Pendapatan Asli Daerah 16
2.3.1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Pengalokasian Belanja Modal 20
2.4. Pengertian Dana Alokasi Umum (DAU) 21
2.4.1. Dasar Hukum DAU..... 21
2.4.2. Alokasi DAU 22
2.4.3. Pengaruh Dana Alokasi Umum dengan Alokasi Belanja .

Modal 22
2.5. Pengertian Belanja Modal .....…… 22
2.5.1. Belanja Modal dalam Anggaran Belanja 22
2.6. Pengertian Anggaran Sektor Publik…… 24
2.6.1. Fungsi Anggaran Sektor Publik 26
2.6.2. Karakteristik Anggaran Sektor Publik 26
2.6.3. PrinsipAnggaran Sektor Publik .....… 27
2.6.4. Proses Penyusunan Anggaran di Indonesia .....… 28
2.6.5. Hubungan Keagenan Penganggaran Sektor Publik 29
2.6.6. Hubungan Keagenan dalam Penyusunan Anggaran .....
Daerah Indonesia ……...….....…….…….…. 30
2.7. Tinjauan Penelitian Terdahulu …..…… 30
2.8. Kerangka Pemikiran ...…….....…...…… 32
2.9. Pengembangan Hipotesis ...…….....…… 33

BAB III. METODE PENELITIAN ...……...……..... 40

3.1. Ruang Lingkup Penelitian Dan Definisi Operasional Variabel .… 40
3.1.1. Ruang Lingkup Penelitian …...…… 40
3.2. Definisi Operasional Variabel ……...……...…… 40
3.2.1. Pertumbuhan Ekonomi …….....…… 40
3.2.2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) ……...……...…… 41
3.2.3. Dana Alokasi Umum ...…….....…… 41
3.2.4. Belanja Modal ...….....…… 42
3.3. Populasi dan Sampel Penelitian .....… 42
3.4. Jenis dan Sumber Data .....… 42
3.5. Metode Pengumpulan Data .....… 43
3.6. Metode Analisis Data .....… 43
3.6.1. Analisis Statistik Deskriptif ...…..……...…… 43
3.6.2. Uji Asumsi Klasik ……...…….....…… 44
3.7. Uji Regresi Berganda .....… 46
3.8. Uji Hipotesis ..…..... 47

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN ……. ...…….....……..... 49

4.1. Deskripsi Data ……...……...…… 49
4.1.1. Pemilihan Sampel ..…… 49
4.1.2. Prtumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Al si
Umum dan Anggaran Belanja Modal tahun 2012-2015.... 50
4.1.3. Statistik Deskriptif..... 51
4.1.4. Pengujian Asumsi Klasik .. ...…...…… 52
4.2. Pengujian Hipotesis …...…… 58
4.2.1. Pengujian Ketepatan Perkiraan Model 59
4.2.2. Pengujian Simultan (Uji Statistik f) ……...…… 60
4.2.3. Pengujian Parsial (Uji Statistik t) ...…….…… 60
4.3. Pembahasan …...…… 63

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN ……..... 69

5.1. Kesimpulan .....……...…..... 69
5.2. Saran .... ……..…..... 70
5.3. Keterbatasan Penelitian ....……..…..... 71

DAFTAR PUSTAKA …….. 72

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Sumatera Tahun 2012-2015 5

Tabel 2. Tinjauan Penelitian Terdahulu..... 30

Tabel 3. Uji Statistik Durbin Watson *d*..... 46

Tabel 4. Pemilihan Sampel..... 49

Tabel 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Sumatera Tahun 2012-2015..... 50

Tabel 6. Hasil Pengolahan Data..... 52

Tabel 7. Analisis Deskriptif..... 52

Tabel 8. Analisis Statistik Non Parametrik K-S..... 55

Tabel 9. Hasil Uji Multikolinearitas..... 56

Tabel 10. Hasil Uji Autokorelasi..... 57

Tabel 11. Hasil Perhitungan Koefisien Determinasi..... 59

Tabel 12. Hasil Uji Statistik *F*..... 60

Tabel 13. Hasil Uji Statistik *t*..... .61

Tabel 14. Hasil Penelitian..... .62

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Sumatera tahun 2012-2015..... 51

Gambar 2. Grafik *normal Probabilityplot*..... 53

Gambar 3. Hasil *Uji Heterokedastisitas* 58

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Pertumbuhan Ekonomi Provinsi / Kabupaten di Sumtera

Lampiran 2. Data Pendapatan Asli Daerah Provinsi / Kabupaten di Sumtera

Lampiran 3. Data Dana Alokasi Umum Provinsi / Kabupaten di Sumtera

Lampiran 4. Data Anggaran Belanja Modal Provinsi / Kabupaten di Sumtera

Lampiran 5. Data Pendapatan Asli Daerah Provinsi / Kabupaten di Sumtera

Lampiran 6. Data Dana Alokasi Umum Provinsi / Kabupaten di Sumtera

Lampiran 7. Data Anggaran Belanja Modal Provinsi / Kabupaten di Sumtera

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masa sentralisasi pemerintahan telah berakhir diganti dengan otonomi daerah. Berdasarkan UU No. 23 tahun 2014, otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus diri sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam UU No. 23 tahun 2014 ini pemberian kewenangan otonomi kepada daerah kabupaten dan daerah kota didasarkan pada asas desentralisasi yang dilaksanakan secara luas, nyata dan bertanggung jawab. Tujuan otonomi daerah dalam undang-undang tersebut adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik yang lebih baik, pemerataan hasil-hasil pembangunan, meningkatkan potensi daerah secara optimal, dan tentunya kemandirian keuangan daerah.

Pemberian otonomi daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah karena memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk membuat rencana keuangannya sendiri dan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat berpengaruh pada kemajuan daerahnya. Kebijakan otonomi daerah merupakan pendelegasian kewenangan yang disertai dengan penyerahan dan

pengalihan pendanaan, sarana dan prasana, dan sumber daya manusia (SDM) dalam kerangka kebijakan fiskal. Dalam menghadapi desentralisasi fiskal menunjukkan bahwa potensi fiskal pemerintah daerah satu dengan daerah yang lain bisa jadi sangat beragam perbedaan ini pada gilirannya dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang beragam pula. Pertumbuhan ekonomi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut (Kuncoro, 2004)

Dengan adanya otonomi daerah pula, maka dengan tegas terjadi pemisahan fungsi antara fungsi pemerintahan daerah (Eksekutif) dengan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Legislatif). Berdasarkan pembedaan fungsi tersebut, menunjukkan bahwa antara eksekutif dan legislatif terjadi hubungan keagenan, eksekutif melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan atas anggaran daerah, yang merupakan manifestasi dari pelayanan kepada publik, sedangkan legislatif berperan aktif dalam melaksanakan legislasi, penganggaran, dan pengawasan (Halim, 2006)

Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian direvisi dengan UU Nomor 23 Tahun 2014, daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sedikit bantuan dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang

dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah. UU tersebut memberikan penegasan bahwa daerah memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumber daya ke dalam belanja-belanja dengan menganut asas kepatutan, kebutuhan dan kemampuan daerah. Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif terlebih dahulu menentukan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas & Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai pedoman dalam pengalokasian sumber daya dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Pengalokasian sumber daya ke dalam anggaran belanja modal sebenarnya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan publik akan sarana dan prasarana umum yang disediakan oleh pemerintah daerah, namun adanya kepentingan politik dari lembaga legislatif yang terlibat dalam penyusunan proses anggaran menyebabkan alokasi belanja modal terdistorsi dan sering tidak efektif dalam memecahkan masalah di masyarakat (Keefer dan Khemani 2003).

Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang

produktif (Saragih, 2003). Pemanfaatan belanja lebih baik dialokasikan untuk hal-hal produktif, misalnya untuk melakukan aktivitas pembangunan, kemudian penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program layanan publik, pendapat ini menyiratkan pentingnya mengalokasikan belanja untuk berbagai kepentingan publik (Darwanto dan Yustikasari, 2007).

Rendahnya belanja modal dapat mempengaruhi kinerja berbagai badan pemerintah. Belanja modal merupakan faktor penting dalam meningkatkan perekonomian, sehingga perlu intervensi layanan pemerintah mencakup rendahnya tingkat pencairan anggaran. Tantangan terberat dalam pembangunan infrastruktur adalah kebutuhan infrastruktur yang sangat tinggi di seluruh wilayah Indonesia. Sementara itu, pemerintah memiliki anggaran relatif terbatas dalam APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara). Pemerintah telah meningkatkan anggaran belanja modal dan pembangunan infrastruktur, tetapi anggaran APBN untuk pembangunan infrastruktur masih dinilai belum mencukupi. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah seharusnya dapat mengalokasikan APBD nya untuk belanja modal, dan tidak habis digunakan untuk belanja pegawai dan belanja rutin.

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan *output* perkapita diproksi dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita (Boediono, 1994). Pertumbuhan ekonomi yang dimaksudkan disini adalah pertumbuhan ekonomi yang tercermin dari PDRB berdasarkan harga berlaku. Pertumbuhan

Ekonomi di Sumatera yang semakin tahun semakin menunjukkan pertumbuhannya menandakan adanya perkembangan kegiatan ekonomi baik dalam kegiatan jasa, maupun perdagangan serta banyaknya pembangunan-pembangunan seperti tempat wisata, restoran, dan hotel di Sumatera.

Pertumbuhan Ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang mendorong barang dan jasa yang diproduksikan ke masyarakat bertambah (Sukirno, 2003). Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dicerminkan dari angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi dari seluruh kegiatan perekonomian di seluruh daerah dalam tahun tertentu atau periode tertentu dan biasanya satu tahun. Menurut Boediono (1994) Pertumbuhan Ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita diproduksi dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita.

Tabel 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Sumatera tahun 2012-2015

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Pendapatan Asli Daerah	Dana Alokasi Umum	Tahun	Belanja Modal
2012	8,08	3.769.194.274.365	31.030.904.223	2013	14.410.114.556.797
2013	8,42	4.541.137.176.177	35.146.572.222	2014	17.811.730.515.686
2014	8,34	6.396.226.617.205	38.380.068.195	2015	16.943.806.407.041

Sumber : Badan Pusat Statistik dan DJPK (data diolah Tahun 2017)

Salah satu indikator utama perkembangan ekonomi suatu daerah adalah Laju Pertumbuhan Ekonomi yang bias dilihat dari Pertumbuhan nilai PDRB.

Pertumbuhan Ekonomi dari tahun 2012 hingga tahun 2014 mengalami kenaikan.

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2013 hingga tahun 2015 mengalami peningkatan. Dapat di lihat pada Tabel 1 yang menyajikan informasi jumlah dan persentase perubahan Pendapatan Asli Daerah pada pemerintah di Sumatera. Pada tahun 2013 ke tahun 2014 terjadi peningkatan.

UU Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dari pengertian yang diambil dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa DAU merupakan sarana untuk mengatasi ketimpangan fiskal antar daerah dan di sisi lain juga memberikan sumber pembiayaan daerah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa DAU lebih diprioritaskan untuk daerah yang mempunyai kapasitas fiskal yang rendah. Kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Penerimaan Dana Alokasi Umum dari tahun 2013 hingga tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 1.

Berdasarkan UU no 23 tahun 2014, Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Dalam PSAP BA 02 paragraf 37

dijelaskan belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal dari tahun 2012 hingga 2015 mengalami peningkatan. Dapat dilihat pada Tabel 1.

Hasil penelitian yang dilakukan Oates (1995), Lin dan Liu (2000) menunjukkan desentralisasi fiskal memberikan dampak yang sangat berarti bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan membuktikan adanya hubungan yang positif dan signifikan. Sedangkan penelitian Darwanto (2007) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki korelasi positif namun tidak signifikan terhadap anggaran belanja modal. Dengan demikian bahwa desntralisasi memberikan dampak yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi dengan mengalokasikan secara lebih efisien berbagai potensi lokal untuk kepentingan layanan publik.

Menurut Putro (2010) dalam penelitiannya di provinsi Jawa Tengah saat ini masih banyak masalah yang dihadapi pemerintah daerah terkait dengan upaya meningkatkan penerimaan daerah. Keterbatasan infrastruktur seperti sarana dan prasarana yang tidak mendukung untuk investasi menimbulkan pertanyaan bagaimana sebenarnya alokasi PAD terhadap anggaran belanja modal, apakah karena PAD yang rendah atau alokasi yang kurang tepat.

Studi Abdullah (2006) menemukan adanya perbedaan preferensi antara eksekutif dan legislatif dalam pengalokasian *spread* PAD ke dalam belanja

sektoral. Alokasi untuk infrastruktur dan DPRD mengalami kenaikan, tapi alokasi untuk belanja modal justru mengalami penurunan. Abdullah (2006) menduga *power* legislatif yang sangat besar menyebabkan diskresi atas penggunaan *spread* PAD tidak sesuai dengan preferensi publik.

Abdullah dan Halim (2006) menemukan bahwa sumber pendapatan daerah berupa PAD dan dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja daerah secara keseluruhan. Meskipun proporsi PAD maksimal hanya sebesar 10% dari total pendapatan daerah, kontribusinya terhadap pengalokasian anggaran cukup besar, terutama bila dikaitkan dengan kepentingan politis (Abdullah, 2006).

Menurut Halim (2001) perbedaan pertumbuhan PAD tidak diikuti dengan kenaikan *share* (kontribusi) PAD terhadap anggaran belanja modal dan peningkatan PAD tidak sebanding dengan peningkatan total belanja mereka.

Dana Alokasi Umum, adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya di dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Konsekuensi akibat penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah mengakibatkan perlunya perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang menyebabkan terjadinya transfer yang cukup signifikan di dalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan pemerintah daerah secara leluasa dapat menggunakan dana

tersebut untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat atau untuk keperluan lain yang mungkin tidak penting.

Berdasarkan penelitian empiris yang dilakukan oleh Holtz-Eakin *et.al.*, (1985) menyatakan bahwa terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja pemerintah daerah. Secara spesifik mereka menegaskan bahwa variabel-variabel kebijakan pemerintah daerah dalam jangka pendek disesuaikan (*adjusted*) dengan transfer yang diterima, sehingga memungkinkan terjadinya respon yang *non-linier* dan *asymmetric.*

Menurut Darwanto (2007) bahwa Pertumbuhan Ekonomi, PAD dan DAU berpengaruh positif terhadap pengalokasian belanja modal dalam ABPD. Hasil penelitian putro (2010) tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap pengalokasian anggaran belanja modal (study kasus pada kabupaten/kota di Provinsi JawaTengah), hasil pengujian menunjukkan bahwa hanya Dana Alokasi Umum yang berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal sedangkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Penelitian ini merupakan penelitian relasional yang akan membuktikan pertumbuhan ekonomi, PAD, dan DAU terhadap anggaran belanja modal pada Pemerintahan Provinsi di Sumatera. Penelitian ini berusaha ingin mengetahui apakah pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka judul penelitian ini adalah :

"Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota di Sumatera."

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan penelitian yang dilakukan pada kasus serupa sebelumnya, maka dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Sumatera ?
2. Apakah pendapatan Asli daerah (PAD) berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Sumatera ?
3. Apakah dana alokasi umum (DAU) berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Sumatera ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, terhadap pengalokasian anggaran belanja modal, yang dijelaskan lebih rinci sebagai berikut :

1. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti yang signifikan pertumbuhan ekonomi terhadap pengalokasian anggaran belanja modal pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Sumatera.

2. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti yang signifikan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap pengalokasian anggaran belanja modal pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Sumatera.
3. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti yang signifikan dana alokasi umum (DAU) terhadap pengalokasian anggaran belanja modal pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Sumatera.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Menambah, melengkapi sekaligus sebagai pembanding hasil-hasil penelitian yang sudah ada menyangkut topik yang sama.
2. Untuk menambah pengetahuan penulis khususnya dalam bidang Pemerintahan Kabupaten/Kota di Sumatera
3. Sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintahan Kabupaten/Kota dalam kebijakan khususnya mengenai komponen Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Sumatera.
4. Sebagai bahan referensi dan informasi bagi peneliti tentang Pertumbuhan Ekonomi PAD, DAU dan Anggaran Belanja Modal.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan

Teori Keagenan menyatakan bahwa hubungan keagenan merupakan sebuah persetujuan (kontrak) di antara dua pihak, yaitu prinsipal dan agen, dimana prinsipal memberi wewenang kepada agen untuk mengambil keputusan atas nama prinsipal, (Jensen dan Meckling, 1976). Dalam teori keagenan terdapat perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal, sehingga mungkin saja pihak agen tidak selalu melakukan tindakan terbaik bagi kepentingan prinsipal. Scott (2000) menjelaskan bahwa teori keagenan merupakan cabang dari *game theory* yang mempelajari suatu model kontraktual yang mendorong agen untuk bertindak bagi prinsipal saat kepentingan agen bisa saja bertentangan dengan kepentingan prinsipal.

Prinsipal pendelegasikan pertanggungjawaban atas pengambilan keputusan kepada agen, dimana wewenang dan tanggungjawab agen maupun prinsipal diatur dalam kontrak kerja atas persetujuan bersama. Kenyataannya, wewenang yang diberikan prinsipal kepada agen sering mendatangkan masalah karena tujuan prinsipal berbenturan dengan tujuan pribadi agen. Kewenangan yang

dimiliki, manajemen bisa bertindak dengan hanya menguntungkan dirinya sendiri dan mengorbankan kepentingan prinsipal. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan informasi yang dimiliki oleh keduanya, sehingga menimbulkan adanya asimetri informasi *(asymmetric information).* Bangun (2009), menyatakan bahwa informasi yang lebih banyak dimiliki oleh agen dapat memicu untuk melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan keinginan dan kepentingan untuk memaksimalkan *utylity*-nya. Sedangkan bagi prinsipal akan sulit untuk mengontrol secara efektif tindakan yang dilakukan oleh manajemen karena hanya memiliki sedikit informasi yang ada.

Teori keagenan yang menjelaskan hubungan prinsipal dan agen berakar pada teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi. Teori keagenan menganalisis susunan kontraktual di antara dua atau lebih individu, kelompok, atau organisasi. Salah satu pihak (*principal*) membuat suatu kontrak, baik secara implisit maupun eksplisit, dengan pihak lain (*agent*) dengan harapan bahwa agen akan bertindak/melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan oleh prinsipal. (Lupia & McCubbins, 2000) menyatakan: *delegation occurs when one person or group, a principal, select another person or group, an agent, to act on the principal's behalf* yang berarti delegasi terjadi ketika seseorang atau kelompok (*prinsipal)* memilih orang atau kelompok lain, (*agent)* bertindak atas nama (*prinsipal).*

Hubungan keagenan antara eksekutif dan legislatif, eksekutif adalah agen dan legislatif adalah prinsipal (Fozzard, 2001). Seperti dikemukakan sebelumnya,

diantara prinsipal dan agen senantiasa terjadi masalah keagenan. Oleh karena itu, persoalan yang timbul diantara eksekutif dan legislatif juga merupakan persoalan keagenan.

Masalah keagenan paling tidak melibatkan dua pihak, yakni prinsipal, yang memiliki otoritas untuk melakukan tindakan-tindakan, dan agen, yang menerima pendelegasian otoritas dari prinsipal, dalam konteks pembuatan kebijakan oleh legislatif, legislatur adalah prinsipal yang mendelegasikan kewenangan kepada agen seperti pemerintah atau panitia di legislatif untuk membuat kebijakan baru. Hubungan keagenan disini terjadi setelah agen membuat usulan kebijakan dan berakhir setelah usulan tersebut diterima atau ditolak.

2.2 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai proses kenaikan *output* perkapita dalam jangka panjang. Ada tiga aspek yang perlu diperhatikan dalam definisi tersebut, yaitu : (1) proses, (2) *output* perkapita, dan (3) jangka panjang.

Sedangkan Simon Kuznet (dalam Jhinngan, 2000 : 57) mendefenisikan pertumbuhan ekonomi suatu negara sebagai “kemampuan negara itu untuk menyediakan barang-barang ekonomi yang terus meningkat bagi penduduknya, pertumbuhan kemampuan ini berdasarkan pada kemajuan teknologi dan kelembagaan serta penyesuaian ideologi yang dibutuhkannya”. Pengertian yang lain, pertumbuhan ekonomi ialah proses kenaikan output

perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Dengan demikian makin tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat, meskipun terdapat indikator yang lain yaitu distribusi pendapatan (Sukirno 2003).

Harga yang berubah merupakan salah satu masalah yang harus dipecahkan ahli ekonomi ketika meraka menggunakan uang sebagai tolak ukur. Salah satu alat ukur yang digunakan dalam mengukur nilai uang dari barang dan jasa adalah menggunakan harga pasar untuk barang dan jasa yang berbeda (Samuelson, 2004). Berdasarkan teori tersebut peneliti menggunakan PDRB harga berlaku sebagai alat ukur untuk menilai pertumbuhan ekonomi. Bastian (2001) juga mengemukakan akan pentingnya peran pemerintah, dengan mengemukakan sejumlah faktor yang mempengaruhi pembangunan daerah. Faktor-faktor tersebut adalah sumber daya alam, tenaga kerja, investasi modal, kewirausahaan, transportasi, komunikasi, komposisi sektor industri, teknologi, pasar ekspor, situasi perekonomian internasional, kapasitas pemerintah daerah, pengeluaran pemerintah dan dukungan pembangunan. Berdasarkan uraian tersebut disimpulkan semakin tinggi tingkat pertumbuhan perekonomian tentu akan mengakibatkan bertumbuhnya investasi modal swasta maupun pemerintah. Hal inilah mengakibatkan pemerintah lebih leluasa dalam menyusun anggaran belanja modal.

2.2.1 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dengan Pengalokasian Belanja Modal

Menurut Boediono (1994), Pertumbuhan ekonomi merupakan angka yang menunjukkan kenaikan kegiatan perekonomian suatu daerah setiap tahunnya. Tanggung jawab agen (Pemerintah daerah) kepada prinsipal (masyarakat) adalah memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat melalui anggaran belanja modal. Karena pertumbuhan ekonomi yang baik harus didukung dengan infrastruktur atau sarana prasarana yang memadai guna memperlancar kegiatan ekonomi masyarakat. Sedangkan sarana dan prasarana tersebut didapatkan dari pengalokasian anggaran belanja modal yang sudah dianggarkan setiap tahunnya dalam APBD. Dengan demikian, ada hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengang pengalokasian belanja modal. Biasanya bila pertumbuhan ekonomi suatu daerah baik, maka pemerintah daerah setempat akan terus meningkatkan alokasi belanja modalnya dari tahun ke tahun guna melengkapi dan memperbaiki sarana dan prasarana, tetapi disesuaikan dengan kondisi dan situasi pada saat tahun anggaran.

2.3 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Yang dimaksud dengan pendapatan daerah sesuai Undang – Undang No.23 Tahun 2014 adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.

Sesuai dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah pasal 6 bahwa Sumber Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut :

Pendapatan Asli Daerah Sendiri yang sah

1. Hasil pajak daerah
2. Hasil retribusi daerah
3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan.
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang asli digali di daerah yang digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat.

Menurut Abdullah (2006: 96) kelompok Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah.

Sesuai UU Nomor 28 Tahun 2009 jenis pendapatan pajak untuk kabupaten/kota terdiri dari:

1) Pajak hotel

2) Pajak restoran

3) Pajak hiburan

4) Pajak reklame

5) Pajak penerangan jalan

6) Pajak pengambilan bahan galian golongan C

7) Pajak Parkir.

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi. Terkait dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 jenis pendapatan retribusi untuk kabupaten/kota meliputi objek pendapatan yang terdiri dari 29 objek.

c. Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:

1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.

2) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMD.

3) Bagian laba penyertaan modal pada perusahaan milik swasta swasta atau kelompok usaha masyarakat.

d. Lain-lain PAD yang sah

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik Pemerintah Daerah. Rekening ini disediakan untuk mengakuntansikan

penerimaan daerah selain yang disebut di atas. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut:

1) Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan
2) Jasa giro
3) Pendapatan bunga
4) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah
5) Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan pengadaan barang, dan jasa oleh daerah
6) Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
7) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
8) Pendapatan denda pajak
9) Pendapatan denda retribusi
10) Pendapatan eksekusi atas jaminan
11) Pendapatan dari pengembalian
12) Fasilitas sosial dan umum
13) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
14) Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan

Secara konseptual, perubahan pendapatan akan berpengaruh terhadap belanja atau pengeluaran, namun tidak selalu seluruh tambahan pendapatan tersebut akan dialokasikan dalam belanja.

Abdullah dan Halim (2004) menemukan bahwa sumber pendapatan daerah berupa PAD dan dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja daerah secara keseluruhan. Meskipun proporsi PAD maksimal hanya sebesar 10% dari total pendapatan daerah, kontribusinya terhadap pengalokasian anggaran cukup besar, terutama bila dikaitkan dengan kepentingan politis (Abdullah, 2006).

2.3.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Pengalokasian Belanja Modal

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pembiayaan untuk anggaran belanja modal. PAD didapatkan dari iuran langsung dari masyarakat, seperti pajak, restribusi, dan lain sebagainya. Tanggung jawab agen (pemerintah daerah) kepada prinsipal (masyarakat) adalah memberikan pelayanan publik (*public service*) yang baik kepada masyarakat melalui anggaran belanja modal, karena masyarakat telah memberikan sebagian uangnya kepada pemerintah daerah. Bentuk pelayanan publik yang diberikan pemerintah kepada masyarakat dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai di daerahnya. Pengadaan infrastruktur atau sarana prasana tersebut dibiayai dari alokasi anggaran belanja modal dalam APBD tiap tahunnya. Dengan demikian, ada hubungan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan pengalokasian belanja modal. Tetapi tidak semua daerah yang berpendapatan tinggi diikuti dengan pertumbuhan ekonomi yang baik pula (Ahmad, 2009).

2.4 Pengertian Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu transfer dana pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dalam pengaturan keuangan menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 adalah provinsi berupa transfer antar pemerintah dari pusat ke kabupaten dan kota yang disebut dengan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Dana Alokasi Umum adalah merupakan transfer yang bersifat umum (*block grant*) yang diberikan kepada semua kabupaten dan kota untuk tujuan mengisi kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fiskalnya dan didistribusikan dengan formula berdasarkan prinsip-pinsip tertentu yang secara umum mengindikasikan bahwa daerah miskin dan terbelakang harus menerima lebih banyak dari pada daerah kaya. Dengan kata lain tujuan alokasi DAU adalah dalam rangka pemerataan kemampuan penyediaan pelayanan publik antar pemda di Indonesia (Prakosa, 2004).

2.4.1 Dasar Hukum DAU

1. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

2. PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

2.4.2 Alokasi DAU

DAU dialokasikan untuk daerah provinsi dan kabupaten / kota. Besaran DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri *netto* yang ditetapkan dalan APBN. Proporsi DAU untuk daerah provinsi dan untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan imbangan kewenangan antara propinsi dan DAU kabupaten/kota.

2.4.3 Pengaruh Dana Alokasi Umum dengan Alokasi Belanja Modal

Hampir sama dengan PAD, DAU merupakan salah satu sumber pembiayaan untuk belanja modal guna pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka pemberian pelayanan publik yang baik dari pemerintah daerah (agen) kepada masyarakat (prinsipal). Bedanya, kalau PAD berasal dari uang masyarakat sedangkan DAU berasal dari transfer APBN oleh pemerintah pusat untuk pemerintah daerah.

2.5 Pengertian Belanja Modal

Menurut Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Anggaran, Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.

2.5.1 Belanja Modal dalam Anggaran Belanja

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas

kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah.

Belanja Modal dapat dikategorikan dalam 5 (lima) kategori utama:

1. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untukpengadaan/pembeliaan/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurugan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2. **Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

4. Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan / penambahan /penggantian / peningkatan pembangunan /pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

5. Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja Modal Fisik Lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan / penambahan / penggantian / peningkatan pembangunan / pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, dan hewan ternak.

2.6 Pengertian Anggaran Sektor publik

Menurut Bastian (2001) adalah rencana operasi keuangan, yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu.

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran

finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran (Bastian, 2001).

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, anggaran daerah merupakan salah satu alat yang memegang peranan penting karena di dalamnya tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber-sumber kekayaan daerah. Tujuan utama proses perumusan anggaran adalah menterjemahkan perencanaan ekonomi pemerintah, yang terdiri dari perencanaan *input* dan *output* dalam satuan keuangan**.** Oleh karena itu, proses perumusan anggaran harus dapat menggali dan mengendalikan sumber-sumber dana publik. Proses pembuatan satu tahun anggaran tersebut dikenal dengan istilah penganggaran.

Proses pembuatan keputusan pengalokasian belanja modal menjadi sangat dinamis karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki serta terdapat banyak pihak dengan kepentingan dan preferensi yang berbeda (Rubin, 1993). Penganggaran setidaknya mempunyai tiga tahapan, yakni :

(1) perumusan proposal anggaran,

(2) pengesahan proposal anggaran,

(3) pengimplementasian anggaran yang telah ditetapkan sebagai produk hukum.

Sedangkan menurut Von Hagen (2005) penganggaran terbagi ke dalam empat tahapan, yakni *excecutive planning,legislative approval, excecutive*

implementation, dan *ex post accountability*. Pada kedua tahapan pertama terjadi interaksi antara eksekutif dan legislatif dan politik anggaran paling mendominasi, sementara pada dua tahap terakhir hanya melibatkan birokrasi sebagai *agent*.

2.6.1 Fungsi Anggaran Sektor Publik

Menurut Mardiasmo (2002), anggaran berfungsi sebagai berikut:

1) Anggaran merupakan hasil akhir proses penyusunan rencana kerja
2) Anggaran merupakan cetak biru akivitas yang akan dilaksanakan di masa mendatang
3) Anggaran sebagai alat komunikasi intern yang menghubungkan berbagai unit kerja dan mekanisme kerja antar atasan dan bawahan
4) Anggaran sebagai alat pengendalian unit kerja
5) Anggaran sebagai alat motivasi dan persuasi tindakan efektif dan efisien dalam pencapaian visi organisasi
6) Anggaran merupakan instrumen politik
7) Anggaran merupakan instrumen kebijakan fiskal

2.6.2 Karakteristik Anggaran Sektor Publik

Menurut Mardiasmo (2002), anggaran mempunyai karakteristik:

1) Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan selain keuangan.

2) Anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu, satu atau beberapa tahun.
3) Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajeman untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.
4) Usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dari penyusunan anggaran.
5) Sekali disusun, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu.

2.6.3 Prinsip Anggaran Sektor Publik

Menurut Bastian (2001), prinsip-prinsip di dalam anggaran sektor publik meliputi:

1) Otorisasi oleh legislatif

Anggaran publik harus mendapatkan otorisasi dari legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut.

2) Komprehensif

Anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, adanya dana *non budgetair* pada dasarnya menyalahi prinsip anggaran yang bersifat komprehensif.

3) Keutuhan anggaran.

Semua penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana umum.

4) *Nondiscretionary Appropriation*.

Jumlah yang disetujui oleh dewan legislatif harus termanfaatkan secara ekonomis, efisien dan efektif.

6) Periodik.

Anggaran merupakan suatu proses yang periodik, bisa bersifat tahunan maupun multi tahunan.

7) Akurat.

Estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi, yang dapat dijadikan sebagai kantong-kantong pemborosan dan *in* efisiensi anggaran serta dapat mengakibatkan munculnya *understimate* pendapatan dan *over estimate* pengeluaran.

8) Jelas.

Anggaran hendaknya sederhana, dapat dipahami masyarakat dan tidak membingungkan.

9) Diketahui publik.

Anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas.

2.6.4 Proses Penyusunan Anggaran di Indonesia

Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Penerapan otonomi daerah di Indonesia tak terlepas dari perubahan paradigma dalam pengelolaan dan penganggaran daerah. Penganggaran kinerja (*performance budgeting*) merupakan konsep dalam penganggaran yang menjelaskan keterkaitan antara pengalokasian sumberdaya dengan pencapaian hasil yang dapat diukur.

Dalam pembahasan anggaran, eksekutif dan legislatif membuat kesepakatan-

kesepakatan yang dicapai melalui *bargaining* (dengan acuan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas & Plafon Anggaran) sebelum anggaran ditetapkan sebagai suatu peraturan daerah. Anggaran yang telah ditetapkan menjadi dasar bagi eksekutif untuk melaksanakan aktivitasnya dalam pemberian pelayanan publik dan acuan bagi legislatif untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan penilaian kinerja eksekutif dalam hal pertanggungjawaban kepala daerah.

2.6.5 Hubungan Keagenan dalam Penganggaran Sektor Publik

Teori keagenan yang menjelaskan hubungan prinsipal dan agen berakar pada teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi. Teori keagenan menganalisis susunan kontraktual di antara dua atau lebih individu, kelompok, atau organisasi. Salah satu pihak (*principal*) membuat suatu kontrak, baik secara implisit maupun eksplisit, dengan pihak lain (*agent*) dengan harapan bahwa agen akan bertindak/melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan oleh prinsipal (Bastian, 2001).

Meskipun diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah, pengelolaan keuangan merupakan salah satu mandat dari rakyat karena uang yang dimiliki pemerintah baik pemerintah tingkat pusat maupun daerah seluruhnya adalah uang milik rakyat yang penggunaannya harus sampai untuk kepentingan rakyat itu sendiri (Mardiasmo, 2002).

2.6.6 Hubungan Keagenan dalam Penyusunan Anggaran Daerah di Indonesia

Penyusunan APBD dilakukan terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang Kebijakan Umum APBD dan Prioritas & Plafon Anggaran yang akan menjadi pedoman untuk penyusunan anggaran pendapatan dan anggaran belanja. Eksekutif membuat rancangan APBD sesuai dengan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas & Plafon Anggaran yang kemudian diserahkan kepada legislatif untuk dipelajari dan dibahas bersama-sama sebelum ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda). Dalam perspektif keagenan, hal ini merupakan bentuk kontrak (*incomplete contract*), yang menjadi alat bagi legislatif untuk mengawasi pelaksanaan anggaran oleh eksekutif (Kuncoro, 2004).

2.7 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tabel 2. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Nama dan Tahun Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Yovita, Farah Marta (2011)	Variabel Dependen : Belanja Modal Independen : Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Alokasi Umum	Pertumbuhan Ekonomi, berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. PAD, tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, dan DAU berpengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja modal

Wandira, Arbie Gugus (2013)	Variabel Dependen : Belanja Modal Independen : Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil	Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel PAD terhadap Belanja Modal Terdapat pengaruh yang signifikan negatif antara variabel DAU, DAK, DBH terhadap Belanja Modal
Novalia, Nanda Dwi (2016)	Variabel Dependen : Belanja Modal Independen : Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.
Swastika, Lingga (2013)	Variabel Dependen : Belanja Modal Independen : Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Alokasi Umum.	Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. pendapatan asli daerah tidak berpengaruh negatif terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran belanja modal

Situngkir, Anggiat (2009)	Variabel Dependen : Belanja Modal Independen : Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.	Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap belanja modal
Putro, Nugroho Suratno (2010)	Variabel Dependen : Belanja Modal Independen : Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum.	Dana Alokasi Umum yang berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.

2.8 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

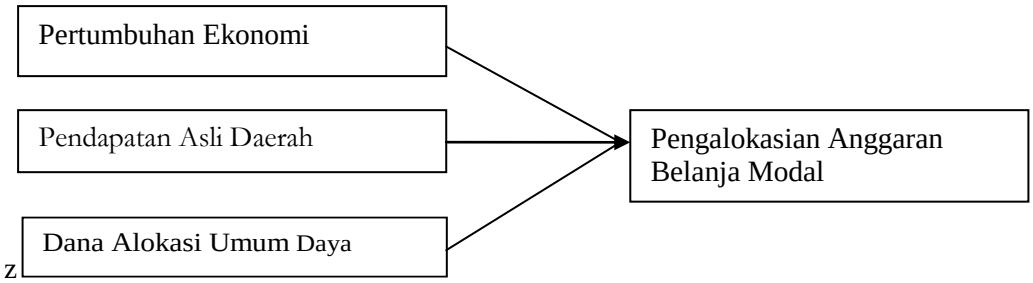

2.9 Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengalokasian Belanja Modal

Agency Theory menjelaskan bahwa ada hubungan kontraktual di antara agen dan prinsipal. Dimana agen bertanggung jawab kepada prinsipal. Dalam konteks pertumbuhan ekonomi, warga Indonesia yang berperan sebagai prinsipal merupakan objek pengukuran pertumbuhan ekonomi. Pemerintah sebagai agen yang bertanggung jawab kepada warga, bertugas untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut dengan memberikan pelayanan yang baik melalui alokasi belanja modal (Bastian, 2001). Pengaruh antara pertumbuhan ekonomi terhadap alokasi belanja modal. Setiap pemerintahan kabupaten/kota pasti menginginkan adanya pertumbuhan ekonomi di daerah yang ada di bawah perintah atau wewenangnya. Karena pertumbuhan ekonomi menunjukkan kredibilitas/campur tangan/kontribusi pemerintah daerah tersebut dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat pemerintahan. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi adalah bukti nyata hasil usaha/kerja pemerintahan daerah dalam memajukan daerahnya. Pertumbuhan ekonomi dapat diciptakan apabila didukung oleh infrastruktur atau sarana prasarana daerah yang baik. Infrastruktur atau sarana prasarana tersebut bisa didapat dari belanja modal yang dianggarkan pemerintah daerah setiap tahunnya. Bila pertumbuhan ekonomi suatu daerah baik maka berpengaruh pula pada alokasi belanja modal pemerintah daerah tersebut, semakin baik pertumbuhan ekonomi daerah tersebut maka semakin menuntut

pemerintahan daerah untuk mengalokasikan belanja modalnya semakin banyak lagi (Bastian, 2001).

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan output perkapita yang diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto. Berdasarkan landasan teori dan argumen di atas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya kebijakan otonomi daerah mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Dimana pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah berbeda-beda sesuai dengan potensi tiap-tiap daerah. Sehingga semakin tinggi tingkat pertumbuhan perekonomian tentu akan mengakibatkan bertumbuhnya investasi modal swasta maupun pemerintahan. Hal inilah yang mengakibatkan pemerintah lebih leluasa dalam menyusun anggaran belanja modal (Bastian, 2001).

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007) meneliti tentang pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Sampel yang digunakan yaitu Kabupaten / Kota di Jawa dan Bali Tahun 2004-2005 dengan alasan ketersediaan data. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi memiliki hubungan positif tetapi tidak signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal, sedangkan penelitian yang dikakukan oleh Wandira (2013) meneliti tentang pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Sampel yang

digunakan yaitu Kabupaten / Kota di Jawa Barat Tahun 2008-2010. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa variabel independen tersebut (variabel Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum) berpengaruh signifikan terhadap variabel Belanja Modal. Sedangkan penelitian Putro (2010) menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap anggaran belanja modal, karena peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah belum tentu diikuti dengan peningkatan anggaran belanja modal, tergantung pada situasi dan kondisi tiap-tiap daerah. Dalam penelitian tersebut menggunakan data realisasi dan untuk variabel anggaran belanja modal tahun berikutnya menggunakan tahun anggaran. Oleh karena itu, untuk hipotesis pertama dinyatakan sebagai berikut:

H1 : Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Pengalokasian anggaran Belanja Modal.

2. **Pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal**

Bila disesuaikan dengan *Agency Theory*, hubungan kontraktual antara agen (masyarakat) dan prinsipal (pemerintah) dalam konteks PAD dapat dilihat dari kemampuan dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik yang baik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui alokasi belanja modal, yaitu dengan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai yang dibiayai dari belanja modal yang dianggarkan setiap tahunnya, sedangkan belanja modal itu sendiri sumber pembiayaannya dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah daerah (agen) bertanggung

jawab kepada masyarakat (prinsipal) karena masyarakat telah memberikan sebagian uangnya kepada pemerintah daerah melalui pajak, retribusi, dan lain-lain (Mardiasmo, 2002).

Dengan demikian, ada hubungan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan pengalokasian belanja modal. Tetapi tidak semua daerah yang berpendapatan tinggi diikuti dengan pertumbuhan ekonomi yang baik pula antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap alokasi belanja modal. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pembiayaan bagi pemerintahan daerah dalam menciptakan infrastruktur daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) didapatkan dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah (Mardiasmo, 2002).

Pemerintah daerah dituntut untuk bisa mengembangkan dan meningkatkan PADnya masing-masing dengan memaksimalkan sumberdaya yang dimiliki supaya bisa membiayai segala kegiatan penciptaan infrastruktur atau sarana prasarana daerah melalui alokasi belanja modal pada APBD. Semakin baik PAD suatu daerah maka semakin besar pula alokasi belanja modalnya. Pemerintah daerah di dalam membiayai belanja daerahnya, selain dengan menggunakan transfer dari pemerintahan pusat yaitu Dana Alokasi Umum, Pemerintahan Daerah juga menggunakan sumber dananya sendiri yaitu Pendapatan Asli Daerah (Situngkir, 2009).

Sebagian studi menyatakan bahwa pendapatan mempengaruhi belanja, sebagian lainnya menyatakan bahwa belanjalah yang mempengaruhi pendapatan. Namun, untuk kasus di Pemda di Indonesia, kecenderungan yang terjadi selama ini adalah Pendapatan mempengaruhi Belanja. Hal ini bisa dilihat dari kebiasaan di daerah dimana menunggu kepastian DAU dulu kemudian menentukan alokasi belanja dalam APBD (Abdullah 2007).

Berdasarkan landasan teotitis dan temuan-temuan empiris di atas, hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut:

H2 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal.

3. Pengaruh antara Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pengalokasian Belanja Modal

Menurut *Agency Theory*, hubungan kontraktual antara agen (masyarakat) dan prinsipal (pemerintah) dalam konteks DAU dapat dilihat dari bagaimana tanggung jawab pemerintah memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat melalui alokasi belanja modal. Hampir sama dengan PAD, DAU merupakan salah satu sumber pembiayaan untuk belanja modal guna pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka pemberian pelayanan publik yang baik dari pemerintah daerah kepada masyarakat. Bedanya, kalau PAD berasal dari uang masyarakat sedangkan DAU berasal dari transfer APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan

desentralisasi antara Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap alokasi belanja modal.

Oleh karena itu, semakin kecil DAU yang diperoleh semakin kecil pula alokasi belanja modal daerah tersebut. Untuk memberi dukungan terhadap pelaksanaan otonomi daerah telah diterbitkan UU 23 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sumber pembiayaan pemerintah daerah didalam rangka perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi, dan pembantuan. Adapun sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan Pinjaman Daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah.

Penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007) dan Putro (2010) menjukkan hasil bahwa variabel dana alokasi umum (DAU) berpengaruh secara terhadap variabel belanja modal. Hal ini disebabkan karena dengan adanya transfer DAU dari pemerintah pusat maka pemerintah daerah bisa mengalokasikan pendapatannya untuk membiayai belanja modal.

Beberapa penelitian sebelumnya juga yang dilakukan oleh Yovita (2011) dan Abdul(2001) menunjukan hasil DAU berpositif signifikan terhadap belanja modal. Dalam penelitian tersebut menggunakan data realisasi dan untuk variabel anggaran belanja modal tahun berikutnya menggunakan tahun

anggaran. Landasan teoritis dan temuan-temuan empiris di atas, menghasilkan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

3.1.1 Ruang Lingkup Penelitian

Untuk menganalisis pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Sumatera, maka penulis menetapkan ruang lingkup penelitian yaitu menggunakan variabel bebas (Independen) antara lain adalah Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, sedangkan variabel tidak bebas (Dependen) adalah Belanja Modal.

3.2 Definisi Operasional Variabel

3.2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Adalah proses kenaikan *output* perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang dan merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan, makin tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat (Boediono, 1994). Pertumbuhan ekonomi diproksi

dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita, yang dihitung dengan rumus :

Pertumbuhan Ekonomi = (PDRBt-PDRBt-1)/(PDRBt-1)x100%

3.2.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Halim (2001), PAD adalah penerimaan dari sumber-sumber daerah sendiri, yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terdiri dari Hasil Pajak Daerah (HPD), Retribusi Daerah (RD), Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah (PLPD) dan lain-lain Pendapatan yang Sah (LPS). yang dirumuskan dengan :

PAD = HPD + RD + PLPD + LPS

3.2.3 Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut Halim (2001), Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu transfer dana Pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU 23 tahun 2014). Dana Alokasi Umum untuk daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota dapat dinyatakan sebagai berikut :

DAU = Celaah Fiskal + Alokasi Dasar

Dimana,

Celah Fiskal = Kebutuhan Fiskal - Kapasitas Fiskal

3.2.4 Belanja Modal

Menurut Halim (2001) Belanja Modal adalah pengeluaran untuk perolehan aset (aset tetap) yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Indikator variabel ini diukur dengan rumus :

Belanja Modal = Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin + Belanja Gedung dan Bangunan + Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan + Belanja Aset Lainnya

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

Menurut Sugiyono (2013), populasi merupakan wilayah *generalisasi* yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pemerintahan Kabupaten/Kota di Sumatera berjumlah 160 Kabupaten / Kota. Menurut Sugiyono (2013), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh Pemerintahan Kabupaten/Kota di Sumatera dari tahun 2012-2015. Data sampel diambil dengan menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut :

1. Laporan realisasi APBD tahun 2012-2015
2. Data Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) tahun 2012-2014

3.4 Jenis dan Sumber Data

Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang bersumber dari dokumen Laporan Realisasi APBD yang diperoleh dari situs resmi Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah melelui internet. Dari laporan Realisasi APBD ini diperoleh data mengenai jumlah realisasi anggaran Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU). Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).

3.5 Metode Pengumpulan Data

Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang bersumber dari dokumen Laporan Realisasi APBD yang diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah. Data yang digunakan adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan khususnya pada Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal dalam Laporan Realisasi APBD tahun anggaran 2013-2015. Untuk data Pertumbuhan Ekonomi yaitu tentang perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).

3.6 Metode Analisis Data

3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran mengenai suatu variabel yang dilihat dari nilai *mean*, standar deviasi, nilai maksimum dan nilai minimum (Sanusi, 2014).

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel dependen dan variabel independen memiliki distribusi normal atau tidak. Mengantisipasi agar tidak terjadinya bias, data yang digunakan harus terdistribusi dengan normal. Model regresi yang baik adalah model regresi yang data residualnya terdistribusi secara normal, namun untuk data yang memiliki sampel besar lebih dari 100 seperti jenis data panel distribusi data residual normal sulit untuk didapatkan sehingga apabila sampel besar maka asumsi kenormalan atas data residual dapat diabaikan (Gujarati, 2010).

Data normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan ploting data akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data adalah normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya (Ghozali, 2005). Selain itu untuk menguji normalitas residual dengan menggunakan uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) jika hasil *Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan nilai signifikan diatas 0,05 maka data residual terdistribusi dengan normal. Sedangkan jika hasil *Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan nilai signifikan dibawah 0,05 maka data residual terdistribusi tidak normal (Ghozali, 2005).

2. Uji Multikilinieritas

Uji *multikolinieritas*, diperlukan untuk mengetahui apakah ada tidak variabel independen yang memiliki kemiripan dengan variabel independen lain dalam

satu model (Santoso, 2001). Selain itu deteksi terhadap multikoliniearitas juga bertujuan untuk menghindari bias dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengaruh pada uji parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Deteksi *multikolinieritas* pada suatu model dapat dilihat jika nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) tidak lebih dari 10 dan nilai Tolerance tidak kurang dari 0,1, maka model tersebut dapat dikatakan terbebas dari *multikolinieritas*. VIF = 1/Tolerance, jika VIF = 10 maka Tolerance = 1/10 = 0,1.

3. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Sanusi (2014), uji *heteroskedastisitas* menguji apakah dalam model regresi varian dari variabel residual bersifat konstan atau tidak, apabila dalam sebuah model regresi terdapat masalah heteroskedastisitas maka akan mengakibatkan nilai varian tidak lagi minimum sehingga mengakibatkan *standard error* yang tidak dapat dipercaya dan hasil regresi dari model tidak dapat dipertanggungjawabkan. Model regresi yang baik adalah yang bersifat *homoskedastisitas*.

Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji Park. Mendeteksi heteroskedastisitas menggunakan uji Park adalah melihat hasil regresi menggunakan *residual kuadrat* sebagai variabel dependen, apabila terdapat variabel independen yang signifikan terhadap residual maka model regresi terdapat masalah *heteroskedastisitas* (Sanusi, 2014).

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi linier terdapat korelasi antara variabel gangguan atau residual, jika dalam model regresi terdapat masalah autokorelasi maka akan menyebabkan varian yang besar dan akan menyebabkan model regresi tidak bersifat BLUE sehingga hasil estimasi dari model regresi tidak dapat dipercaya.

Uji autokorelasi dapat diuji dengan menggunakan DW *test (Durbin-Watson test).* DW *test* dilakukan dengan cara membandingkan nilai DW hitung (*d*) dengan nilai d_L dan d_U pada tabel *Durbin-Watson.* Tabel 3 menjelaskan mengenai *rule of thumb* dari DW *test* sebagai berikut:

Tabel 3. Uji Statistik Durbin Watson *d*

Nilai Statistik *d*	Hasil
$0 < d < d_L$	Ada Autokorelasi Positif
$d_L < d < d_U$	Tidak Dapat Diputuskan
$d_U < d < 4- d_U$	Tidak Ada Autokorelasi
$4- d_U < d < 4- d_L$	Tidak Dapat Diputuskan
$4- d_L < d < 4$	Ada Autokorelasi Negatif

Sumber: Sanusi (2014)

Keterangan: *Nilai dU dan dL dapat diperoleh dari tabel statistik Durbin Watson yang bergantung pada banyaknya observasi dan banyaknya variabel yang menjelaskan*

3.7 Uji Regresi Berganda

Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah regresi berganda (*multiple regression*), hal ini sesuai dengan rumusan masalah, tujuan dan hipotesis penelitian ini. Metode regresi berganda menghubungkan satu variabel dependen dengan beberapa variabel independen dalam suatu

model prediktif tunggal. Uji regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal. Hubungan antar variabel tersebut dapat digambarkan dengan persamaan sebagai berikut :

$$\mathbf{Y} = \alpha + ß1PDRB + ß2PAD + ß3\mathbf{DAU} + \boldsymbol{e}$$

dimana :

Y = Belanja Modal (BM)

α = Konstanta

ß = Slope atau koefisien regresi atau intersep

PDRD = Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PAD = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

DAU = Dana Alokasi Umum (DAU)

e = *error*

Model analisis regresi berguna untuk mengestimasi parameter-parameter regresi untuk membantu menjawab hipotesis penelitian. Perhitungan estimasi parameter regresi dan uji-uji statistik yang digunakan dalam penelitian didukung dengan program SPSS.

3.8 Uji Hipotesis

Uji hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan uji t. Sebelum melakukan regresi sebaiknya dilakukan uji kelayakan model terlebih dahulu dengan menggunakan koefisien determinasi dan uji statistik F. Koefisien determinasi (R^2) dapat dilihat pada nilai *R-square* hasil regresi SPSS.Sementara, uji

statistik F dapat dilihat pada nilai F-*Statistic* pada hasil regresi SPSS. Uji statistik t digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh variabel independen secara parsial dalam menjelaskan variabel dependen (Sanusi, 2014).

Dasar pengambilan keputusan untuk uji t adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan nilai statistik t
   - Jika nilai t hitung < t tabel maka H_0 diterima.
   - Jika nilai t hitung > t tabel maka H_0 ditolak.
2. Berdasarkan nilai probabilitas signifikansi
   - Jika nilai probabilitas signifikansi < tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$ maka H_0 diterima.
3. Jika nilai probabilitas signifikansi > tingkat signfikansi $\alpha = 0,05$ maka H_0 ditolak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil-hasil pengujian dan analisis yang telah dilakukan mengenai pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera tahun 2012-2015, maka simpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal tahun berikutnya pada Kabupaten/Kota di Sumatera tahun 2012-2014. Hal ini dikarenakan Pertumbuhan Ekonomi cenderung stabil disetiap tahunnya, sedangkan Anggaran Belanja Modal terus meningkat disetiap tahunnya.
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal tahun berikutnya Kabupaten/Kota di Sumatera tahun 2012-2014. Pemerintah Daerah yang memiliki PAD tinggi maka pengeluaran untuk alokasi belanja daerahnya juga semakin tinggi.
3. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal tahun berikutnya Kabupaten/Kota di

Sumatera tahun 2012-2014. Pemerintah Daerah yang memiliki DAU tinggi maka pengeluaran untuk alokasi belanja daerahnya juga semakin tinggi.

5.2 saran

Saran yang dapat diajukan untuk penelitian selanjutnya adalah :

1. Penelitian ini menggunakan sampel Kabupaten/Kota pada Provinsi di Sumatera saja. Sampel yang diambil masih kurang memenuhi jumlah sampel minimal dari 160 Kabupaten/Kota hanya 67 Kabupaten/Kota. Studi ini dapat diperluas dengan menggunakan sampel di luar Sumatera.
2. Penelitian ini menggunakan SPSS, penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan Eviews untuk mendapatkan hasil yang tidak bias dan maksimal.
3. Penggunaan data yang lebih lengkap dengan rentang periode waktu penelitian yang lebih panjang sehingga lebih mampu untuk dapat dilakukan generalisasi atas hasil penelitian tersebut.
4. Variabel yang digunakan dalam penelitian yang akan datang diharapkan lebih lengkap dan bervariasi, dengan menambah variabel independen lain ukuran-ukuran atau jenis-jenis penerimaan pemerintah daerah lainnya, maupun variabel non keuangan seperti kebijakan pemerintah, kondisi makroekonomi.

5.3 Keterbatan Penelitian

Keterbatasan penelitian ini yaitu :

1. Sampel dalam penelitian ini di batasi pada Kabupaten / Kota yang memiliki ketersediaan data, yaitu 67 Kabupaten / Kota di Sumatera. Hal ini menyebabkan hasil penelitian hanya berlaku untuk Kabupaten / Kota yang menjadi sampel penelitian, sehingga hasilnya belum dapat di generalisasi untuk seluruh kabupaten / Kota di Indonesia.
2. Penelitian ini tidak memberikan secara rinci alokasi penggunaan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum manakah yang memberikan kontribusi besar terhadap anggaran belanja modal.
3. Penelitian ini tidak membahas kebijakan pemerintah dalam penyusunan anggaran Belanja Modal.
4. Pada Penelitian ini regresi dilakukan sekaligus 3 tahun, untuk penelitian selanjutnya melakukan teknis analisis dengan cara meregresi pertahun untuk menghindari hasil penelitian yang bias.

DAFTAR PUSTAKA

Ardhani, Pungky and Ardiyanto, Moh Didik (2011) *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal* (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah). *Diponegoro Journal of Accounting.* Universitas Diponegoro. Semarang

Bangun, Andrias, 2009. *"Pengaruh Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran Kejelasan Sasaran Anggaran dan Struktur Desentralisasi Terhadap Kinerja Manajerial SKPD Dengan Pengawasan Internal Sebagai Variabel Pemoderasi"* (Studi kasus pada Pemerintahan Deli Serdang), *USU Journal of Legal Studies* (UJLS). Medan.

Boediono. 1994. Teori *Pertumbuhan Ekonomi*, Edisi 1. BPFE. Yogyakarta.

Bastian, Indra. 2001. Sistem Akuntansi Sektor Publik. Salemba Empat: Jakarta.

Darwanto & Yulia Yustikasari. 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *Simposium Nasional Akuntansi X* Makasar 26-28 Juli 2007. Makasar.

Fozzard, Adrian. 2001. The Basic Budgeting Problem : Approaches to resource allocation in the public sector and their implications for pro-poor budgeting.

Furqani, Astri. 2013. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Pada Pemkab Sumenep. Jurnal bisnis dan Akuntansi.*Universitas Wiraraja. Sumenep.

Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Edisi III, Badan Penerbit UNDIP. Semarang.

Gujarati, Damodaran. 2010. *Dasar-dasar Ekonometrika.* Salemba Empat. Jakarta.

Halim, Abdul. 2001. *Analisis Deskriptif Pengaruh Fiscal Stress pada APBD Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota di Jawa Tengah*. STIE. Yogyakarta.

Halim, Abdul & Syukriy Abdullah. 2006. Hubungan dan masalah keagenan di pemerintahan daerah: sebuah peluang penelitian anggaran dan akuntansi. *Jurnal Akuntansi Pemerintah 2(1).* Jakarta.

Holtz-Eakin, Doglas, Harvey S and Schuyley Tilly, 1985. Intempora Analysis of State A Local Goverment Spending: Theory and Tests. Journal of Urban Economics 35 : 159-174.

Jensen, M.C dan Meckling, W.H. 1976. Theory of the Firm : Managerial Behavior Agency Costs and Ownership Structure, staggered Boards. *Journal of Financial Economics,* Oktober, 1976, V. 3, No. 4, pp. 305-360.

Jhinghan, ML. 2000. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan.* PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Keefer, P. Dan Stutu Khemani. 2003. *The Political Economy of Public Expenditures.* Background paper for WDR 2004.

Kuncoro, Mudrajat. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah : Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang.* Jakarta : Penerbit Erlangga.

Lin, Justin Yifu dan Zhi Qiang Liu. 2000. *Fiscal Decentralization and Economic Growth in China.* Journal of Economic Development and Cultural Change: Vol. 49, pl-21. Chicago

Lupia, Arthur dan Mathew McCubbins. 2000. Representation or abdication? How citizens use institutions to help delegation succeed. *European Joural of Political Research* 37 : 291-307.

Maharani, Mayzestika. 2010. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum, Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah se Jawa Tengah. *Scientific Journals Of Unnes*. Universitas Negeri Semarang. Semarang.

Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi : Yogyakarta.

Nanda, Dwi Novalia. 2016. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintahan Daerah Kabupaten / kota di Provinsi Lampung.* Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Lampung. Bandar Lampung.

Oates, Wallace E. 1995. *Comment on " Conflict and Dillemas of Desentralization" by Rudolf Holmes.* The Word Bank Research Observer. Page : 351-353.

PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. *http://www.djpk.depkeu.go.id/attach/post-pp-no-55-tahun-2005-tentang-dana-perimbangan/--233-268-PP55_2005.pdf.i*. Diakses pada 21 Agustus, 2017, Pkl 20.00 WIB.

Prakosa, Kesit Bambang. 2004. Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan DIY), JAAI Volume 8 No.2, Desember 2004

Putro, Nugroho Suratno. 2010. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Kasus pada Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. *Diponegoro Jurnal Of Accounting*. Universitas Diponegoro. Semarang.

Rubin, Irene S. 1993. *The Politics of Public Budgeting : Getting and Spending, Borrowing and Balancing.* Second Edition. Chatam, NJ : Chatam House Publishers, Inc.

Samuelson, Paul. 2004. *Ilmu Makro Ekonomi*, Edisi 17(terjemahan). Penerbit Media Global Edukasi. Jakarta.

Sanusi. 2014. *Metode Penelitian Bisnis*. Salemba Empat. Jakarta.

Santoso, singgih. 2001. *SPSS 10: Mengolah Data Statistik Secara Profesional.* Jakarta : PT Elex Media Komputindo

Saragih, J. 2003. Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi. Penerbit Ghalia Indonesia. Jakarta.

Scott, William R. 2000. *Financial Accounting Theory*. USA : Prentice-Hall.

Situngkir, Anggiat. 2009. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Anggaran Belanja Modal Pada Pemko/Pemkab Sumatera Utara. *USU Journal of Legal Studies* (UJLS). Medan.

Sukirno, Sadono. 2003. Pengantar Teori Mikro Ekonomi. PT Salemba Empat. Jakarta

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kombinasi.* CV Alfabeta. Bandung.

Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah. *http://www.djpk.depkeu.go.id/attach/post-uu-no-23-tahun-2014-tentang-pemerintahan-daerah/UU-227-262*

UU_No._23_Tahun_2014_Pemerintahan_Daerah.pdf. Diakses pada 21 Agustus, 2017, Pkl 19.00 WIB.

Undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah. *http://www.djpk.depkeu.go.id/?p=36.* Diakses pada 21 Agustus, 2017, Pkl 19.20 WIB.

Universitas Lampung. 2012. *Panduan Penulisan Karya Ilmiah*. Universitas Lampung. Bandarlampung.

Von, Hagen, 2005. *Political Economy of Fiscal Institutions, Discussion paper149, Governance and Efficiency of Economic System,* GESY.

Wandira, Arbie Gugus. 2013. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap PengalokasianBelanja Modal* (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Se Indonesia Tahun 2012). *USU Journal of Legal Studies* (UJLS). Medan.

Yani, Ahmad.2009. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia, Edisi Revisi. Rajawali Pers : Jakarta.*

Yovita, Farah Marta. 2011. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi Se Indonesia Periode 2008 – 2010). *Diponegoro Jurnal Of Accounting*. UNDIP. Semarang.